



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

 <p><b>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</b></p> <p><b>TIM NERACA WILAYAH</b></p>	Nomor SOP	SOP-065/17000/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu  Win Rizal
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENGHITUNGAN PENGELOUARAN KONSUMSI LNPRT</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik;</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.</li> </ol>	Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan perilaku konsumsi LNPRT, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Penghitungan Konsumsi LNPRT ADHB SOP Penghitungan Konsumsi LNPRT ADHK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Data SKLNPRT</li> <li>Lembar Kerja</li> <li>Pengolah</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Jika Penghitungan Konsumsi LNPRT Tahunan gagal atau sistem tidak berjalan dengan baik maka PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahunan tidak dapat dilakukan	Pengeluaran konsumsi LNPRT yang dihasilkan sejalan dengan siklus perilaku konsumsi rumahtangga dan dapat dikontrol dengan besaran input/suplai barang-barang konsumsi	



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSN  
\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Fungsional	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					1 Hari	Lembar Kerja	
2.	Pengumpulan data dan fenomena				Kuesioner SKLNPRT, Indeks Harga	15 Hari	Data SKLNPRT	
3.	Penghitungan Konsumsi LNPRT Harga Berlaku				Lembar Kerja, Data SKLNPRT	1 Minggu	PKLN PRT ADHB	
4.	Penghitungan Konsumsi LNPRT Harga Konstan				Lembar Kerja, PKLN PRT ADHB, dan IHK	1 Minggu	PKLN PRT ADHK	
5.	Angka Inisial LNPRT (Putaran NOL)				PKLN PRT ADHB, ADHK, dan fenomena	3 Hari	Angka Inisial PKLN PRT	
6.	Rekonsiliasi Konsumsi LNPRT				PKLN PRT putaran Nol	2 Minggu	PKLN PRT	
7.	PKLN PRT							

